

**PERANAN PEMERINTAH DAERAH KOTA PADANG DALAM  
MENANGGULANGI PENGELOLAAN WISATA PULAU-PULAU KECIL  
TANPA IZIN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2007  
TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR  
DAN PULAU-PULAU KECIL**

**SKRIPSI**

*Diajukan sebagai syarat untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



**DISUSUN OLEH:**

**IDRI YANTI**

**1510012111109**

**Program Kekhususan  
HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PADANG**

**2019**

**No. Reg: 18/SKRIPSI/HTN/FH/02/VIII/2019**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN SKRIPSI**  
**REG.NO: 18/SKRIPSI/HTN/FH/02/VIII/2019**

Nama : **Idri Yanti**  
Nomor : **1510012111109**  
Program Kekhususan : **Hukum Tata Negara**  
Judul Skripsi : **Peranan Pemerintah Daerah Kota Padang Dalam  
Menanggulangi Pengelolaan Wisata Pulau-Pulau  
Kecil Tanpa Izin Menurut Undang-Undang Nomor  
27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir  
Dan Pulau-Pulau Kecil.**

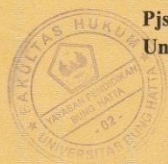
Telah disetujui pada hari **Selasa** tanggal **Tiga Puluh Bulan Juli** tahun **Dua Ribu  
Sembilan Belas** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

1. **Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H (Pembimbing I)**

2. **Nurbeti, S.H., M.H**

**(Pembimbing II)**

Mengetahui:



**Pjs, Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta**

**(Dra. Susi Herawati, M.Pd)**

**Ketua Bagian  
Hukum Tata Negara**

**(Suamperi, S.H., M.H)**

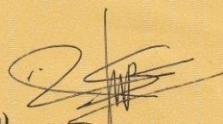
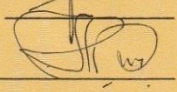
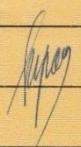
**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PENGESAHAN SKRIPSI  
REG.NO : 18/SKRIPSI/HTN/FH/02/VIII/2019**

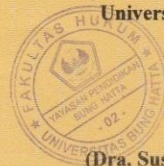
Nama : Idri Yanti  
NPM : 1510012111109  
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Peranan Pemerintah Daerah Kota Padang  
Dalam Menanggulangi Pengelolaan Wisata  
Pulau-Pulau Kecil Tanpa Izin Menurut  
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007  
Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan  
Pulau-Pulau Kecil.

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Bagian Hukum, Tata Negara  
pada hari Selasa tanggal Enam Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Sembilan  
Belas dan dinyatakan LULUS.

**SUSUNAN TIM PENGUJI :**

1. Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H (Ketua) 
2. Nurbeti, S.H, M.H (Sekretaris) 
3. Maiyestati, S.H., M.H (Anggota) \_\_\_\_\_
4. Drs. Suparman Khan, M.Hum (Anggota) 
5. Suamperi, S.H., M.H (Anggota) \_\_\_\_\_

**Pjs, Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta**



**(Dra. Susi Herawati, M.Pd)**

**PERANAN PEMERINTAH DAERAH KOTA PADANG DALAM  
MENANGGULANGI PENGELOLAAN WISATA PULAU-PULAU KECIL  
TANPA IZIN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2007  
TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR  
DAN PULAU-PULAU KECIL**

**Idri Yanti<sup>1</sup>, Dr. Sanidjar Pebrihariati R, SH.M.H<sup>1</sup>, Nurbeti, S.H., M.H<sup>1</sup>,  
Program Studi, Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta.**

**Email : [Idriyanti20@gmail.com](mailto:Idriyanti20@gmail.com)**

**ABSTRAK**

Pulau-pulau kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 Km<sup>2</sup>, beserta kesatuan ekosistemnya. Pengelolaan Pulau-Pulau kecil diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, tetapi dalam penerapannya pengelolaan pulau-pulau kecil yang ada di Kota Padang belum memiliki izin pengelolaan. Rumusan masalah adalah (1) Bagaimana Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Padang Dalam Pemberian Izin Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (2) Bagaimana Upaya Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Daerah Kota Padang Dalam Menanggulangi Pengelolaan Wisata Pulau-Pulau Kecil Tanpa Izin. Jenis penelitian ini dilakukan adalah penelitian Hukum Sosiologis dengan menggunakan Data Primer dan Data Sekunder serta analisa data secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian didapat: (1) Dalam Pemberian izin Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Wali Kota bertugas memberdayakan masyarakat pada setiap tahapan sesuai dengan tahapan yang telah di tentukan undang-undang serta berwenang mencabut izin pemanfaatan dan Hak Pengusaha perairan Pesisir dari dunia usaha dan masyarakat apabila melanggar ketentuan Perundang-undangan 2) Upaya yang dilakukan Oleh Pemerintah Daerah Kota Padang Dalam Menanggulangi Pengelolaan wisata Pulau-Pulau Kecil Tanpa Izin, yang seharusnya dikelola oleh pemerintah sehingga Wisata Pulau-Pulau Kecil Kota Padang menjadi wisata yang aman dan di kelola oleh pihak yang bewenang sesuai ketentuan yang berlaku

**Kata Kunci: Peranan, Pemerintah Daerah, Pengelolaan Wilayah Pesisir**

## KATA PENGANTAR



Assalammu'alaikum Wr.Wb

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta bimbingan, kekuatan lahir bathin dan tidak lupa penulis ucapkan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad S.A.W yang telah membawa kita dari alam jahiliah sampai ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan pada saat sekarang ini. Penulis sangat bersyukur atas kelancaran serta adanya dorongan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “ **PERANAN PEMERINTAH DAERAH KOTA PADANG DALAM MENANGGULANGI PENGELOLAAN WISATA PULAU-PULAU KECL TANPA IZIN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL** “

Dalam menyelesaikan skripsi ini banyak sekali kendala yang penulis hadapi, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar diri penulis sendiri. Namun pada akhirnya berkat do'a dan dorongan, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak serta kerja keras dari penulis. Akhirnya skripsi ini bisa selesai.

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada ibu **Dr.Sanidjar Pebrihariati R, SH .,M.H** sebagai pembimbing I, serta yang sudah membantu dalam segala perkuliahan. Terima kasih kepada ibu **Nurbeti, SH., M.H** sebagai pembimbing II serta yang sudah membantu saya dalam perkuliahan.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dra. Susi Herawati, MPd., selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, yang sebelumnya dijabat oleh Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H.,
2. Bapak **Dr. Zarfinal, SH., M.H** , sebagai Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

3. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan semangat kepada penulis selama ini.
4. Ibu **Dr. Maiyestati, SH., M.H** selaku penguji I, Bapak **Drs. Suparman Khan, M.Hum** selaku penguji II, Bapak **Suamperi, SH., M.H** selaku penguji III yang telah menguji serta memberikan kritikan dan saran dalam penulisan skripsi ini agar lebih baik lagi.
5. Karyawan/I Tata Uaha Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memperlancarkan jalanya administrasi
6. Bapak **Ir. Alber Krisdiarto, M.Si**, Ibu **Resi Suruati, S,Pi, M,Si**, Bapak Darmadi, **S.sos** dan Bapak **Suhailis, SH** sebagai responden dalam wawancara penelitian penulis
7. Khususnya bagi orang tua penulis Bapak **Ali Usman** dan Ibu **Nurbaiti**, yang tidak pernah lelah memberikan doa serta dukungan baik moril maupun materil demi kesuksesan anaknya, Semoga perjuangan penulis selama ini memberi kebahagiaan Amak dan Abak. Amin
8. Untuk sahabat Penulis **Meimia Selvita, SH, Mimi Prihartini, Marin Eka Putri, Risna Wahyuni** yang telah memberikan nasehat dan motivasi dalam berjuang mencapai kesuksesan
9. Untuk sahabat dekat penulis **Tari Wahyu Ningsih, S.AP**, yang telah menjadi sahabat yang tiada gantinya dan yang telah memberikan do'a bantuan dan dukungan kepada penulis
10. Untuk seluruh Kakak penulis **Ratna wati, Fitra Yenti, Helda Wati, Mega Wati, Arlisma, Indra Joni, Filtra Darman, Roni Darman**, yang telah menjadi tempat mengadu keluh kesah penulis baik dalam segi materil muapun dalam penulisan sripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna dikarenakan keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Maka dengan segala kerendahan hati, penulis sangat menghargai kritik serta saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak sebagai usaha menyempurnakan ke yang lebih baik. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Semoga Allah member balasan yang setimpal atas kebaikan dan ketulusan hamba-Nya, Amin.

Padang, Agustus 2019

Penulis

**Idri Yanti**

**1510012111109**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Metode Penelitian.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Peranan	
1. Pengetian Peranan.....	12
B. Tinjauan Umum Tentang Pemerintah Daerah	
1. Pengertian Pemerintah Daerah.....	13
2. Asas-asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.....	14
3. Tugas dan Kewenangan Pemerintah Daerah.....	14
4. Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah.....	16
C. Tinjauan Umum Tentang Parawisata	
1. Pengertian Parawisata.....	17
2. Jenis-jenis Parawisata.....	19
D. Tinjauan Umum Tentang Puaau-Pulau Kecil	
1. Pengertian Pulau-Pulau Kecil.....	22
2. Asas dan Tujuan Pulau-Pulau Kecil.....	22
3. Manfaat Pulau-Pulau Kecil.....	24
4. Proses Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil.....	25
E. Tinjauan Umum Tentang Perizinan	
1. Pengertian Perizinan.....	26
2. Sifat Izin.....	27



3. Proses dan Prosedur Perizinan.....	28
4. Tujuan Pemberian Izin.....	29

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Padang Dalam Pemberian Izin Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.....	31
B. Upaya Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Daerah Kota Padang Dalam Menanggulangi Pengelolaan Wisata Pulau-Pulau Kecil Tanpa Izin..	43

### **DAFTAR PUSTAKA**